

**LAPORAN AKUNTABILITAS
KINERJA PEMERINTAHAN
(LAKIP)**



**KECAMATAN BONTOSIKUYU
TAHUN 2024**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif, penilaian dan pelaporan kinerja pemerintah daerah menjadi bagian kunci dalam proses penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Upaya ini juga selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Untuk itu, pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat, termasuk dalam pengembangan akuntabilitas melalui penyusunan dan pelaporan kinerja pemerintah daerah.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Bontosikuyu disusun berdasarkan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Pemerintah Kecamatan Bontosikuyu.

Pada setiap akhir tahun anggaran setiap instansi sudah mulai melakukan proses penyusunan LAKIP untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja setiap instansi pemerintah, yang dalam hal ini adalah Pemerintah Kecamatan Bontosikuyu. LAKIP menjadi dokumen laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung-jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Dalam lampiran Instruksi Presiden

LAKIP KECAMATAN BONTOSIKUYU TAHUN 2024

Republik Indonesia No. 7 Tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah disebutkan bahwa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahunan dari setiap Kabupaten/Kota disampaikan kepada Presiden/Wakil Presiden dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, Gubernur/Kepala Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kepala Perwakilan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

B. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya LAKIP Kecamatan Bontosikuyu Tahun 2024 adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah selama kurun waktu 1 (Satu) Tahun dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi.

Penyusunan LAKIP juga menjadi alat kendali untuk mendorong peningkatan kinerja setiap unit organisasi.

Adapun tujuan penyusunan LAKIP sebagai salah satu alat untuk mendapatkan masukan stakeholders demi perbaikan kinerja Pemerintah Kecamatan Bontosikuyu. Identifikasi keberhasilan, permasalahan dan solusi yang tertuang dalam LAKIP, menjadi sumber untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang. Dengan pendekatan ini, LAKIP sebagai proses evaluasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perbaikan yang berkelanjutan di pemerintah untuk meningkatkan kinerja pemerintahan melalui perbaikan pelayanan publik.

C. Gambaran Umum Kecamatan Bontosikuyu

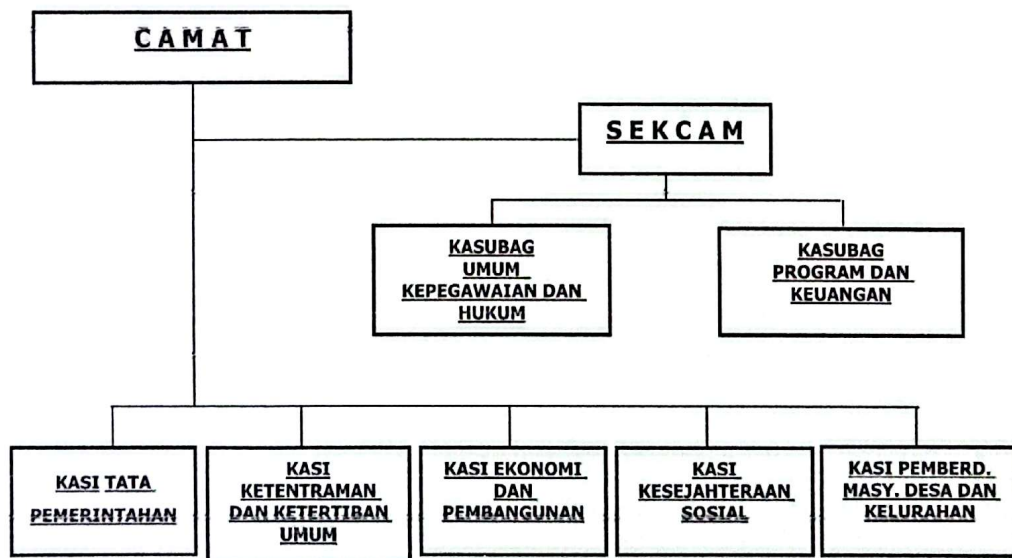
1. Struktur Pemerintah Kecamatan Bontosikuyu

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar, Struktur Organisasi Kecamatan, terdiri dari :

- a. Camat
- b. Sekretariat, meliputi :
 1. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Hukum;
 2. Sub Bagian Program dan Keuangan.
- c. Seksi Tata Pemerintahan;
- d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- e. Seksi Ekonomi dan Pembangunan;
- f. Seksi Kesejahteraan Sosial; dan
- g. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa & Kelurahan.

Secara rinci Struktur Organisasi Kantor Kecamatan Bontosikuyu Kabupaten Kepulauan Selayar dapat dilihat pada Bagian Berikut dibawah ini :

Struktur Organisasi Kecamatan



2. Tugas Pokok dan Fungsi

Pedoman dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi adalah Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dan Peraturan Bupati Selayar Nomor 84 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan Bontosikuyu Kabupaten Kepulauan Selayar. Adapun rincian Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Kecamatan adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar sebagaimana termuat dalam Pasal 37 ayat (1) dan (2) yang menyebutkan :

Ayat (1) : Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 mempunyai tugas meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.

Ayat (2) : Camat dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

- a. penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
- b. pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. pengkoordinasian penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
- e. pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
- g. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa atau sebutan lain dan/atau kelurahan;

- h. melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah kabupaten yang ada di kecamatan; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan oleh Bupati dan peraturan perundang-undangan.

2. Berdasarkan Peraturan Bupati Selayar Nomor 84 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan Bontosikuyu Kabupaten Kepulauan Selayar, adalah sebagai berikut :

a. Camat

- 1. Camat mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang urusan otonomi daerah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.]
- 2. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada angka (1), Camat menyelenggarakan fungsi:
 - a) perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang urusan otonomi daerah;
 - b) *pelaksanaan* kebijakan urusan pemerintahan bidang otonomi daerah;
 - c) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang otonomi daerah;
 - d) pelaksanaan administrasi Kecamatan; dan
 - e) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

b. Sekretaris Camat

- 1. Sekretaris mempunyai tugas membantu Camat dalam mengoordinasikan kegiatan, memberikan pelayanan teknis dan administrasi penyusunan program, pelaporan, umum, kepegawaian, hukum, dan keuangan dalam lingkungan Kecamatan.

2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada angka (1), Sekretaris menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengoordinasian pelaksanaan tugas dalam lingkungan Kecamatan;
 - b. pengoordinasian penyusunan program, pelaporan dan hukum;
 - c. pengoordinasian urusan umum dan kepegawaian;
 - d. pengoordinasian pengelolaan administrasi keuangan; dan
 - e. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

c. Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Hukum

Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Hukum mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam mengumpulkan bahan dan melakukan urusan ketatausahaan, administrasi pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang, urusan rumah tangga, mengelola administrasi kepegawaian serta Pengelolaan Peraturan Perundang-undangan.

d. Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan

Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam mengumpulkan bahan dan Penyusunan Program dan anggaran pengelolaan data pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pengelolaan dan pelaporan keuangan.

e. Kepala Seksi Tata Pemerintahan

Kepala Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas membantu Camat dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pemerintahan.

f. Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas membantu Camat dalam mengoordinasikan dan melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang ketenteraman dan ketertiban umum.

g. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan

Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas membantu Camat dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang ekonomi dan pembangunan.

h. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial

Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas membantu Camat dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang kesejahteraan sosial.

i. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan mempunyai tugas membantu Camat dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.

3. Sumber daya

Jumlah pegawai keseluruhan yang ada di Kantor Kecamatan Bontosikuyu sebanyak 31 orang yang terdiri dari PNS 14 orang, Tenaga kontrak 17 orang, Pol PP 0 orang, untuk lengkapnya dapat

Tabel I.1. Jumlah Pegawai Kantor Kecamatan Bontosikuyu

NO.	PEGAWAI	JUMLAH (ORANG)	%
1.	PNS	14	52,17
2.	PTT	17	47,83
3.	Pol. PP	0	0
	JUMLAH	31	100

Berdasarkan jabatan struktural, kondisi pegawai dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel I.2. Jumlah Pegawai Kantor Kecamatan Bontoharu menurut Jenjang Jabatan

NO.	JABATAN/STAF	JUMLAH (ORANG)	%
1.	Eselon III/a	1	8
2.	Eselon III/b	1	8
3.	Eselon IV/a	5	42
4.	Eselon IV/b	2	17
5.	Jabatan Pengadministrasi	5	25
	JUMLAH	14	100

Berdasarkan pangkat/golongan, kondisi pegawai dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel I.3. Jumlah Pegawai Kantor Kecamatan Bontosikuyu menurut Pangkat/Golongan

NO.	GOLONGAN	JUMLAH (ORANG)	%
1.	IV	3	17
2.	III	10	83
3.	II	1	-
4.	I	-	-
	JUMLAH	14	100

Apabila dilihat dari tingkat pendidikan pegawai pada Kantor Kecamatan Bontosikuyu, maka status pendidikan dengan Strata-2 sebesar - 17 %, Strata-1 sebesar 75 %, Sarjana Muda 0 % sedangkan tingkat SLTA sebesar 8 %. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel, berikut :

Tabel I.4. Jumlah Pegawai Kantor Kecamatan Bontosikuyu menurut Pendidikan

NO.	PENDIDIKAN	JUMLAH (ORANG)	%
1.	Strata-2 (S2)	2	17
2.	Strata-2 (S1)	9	75
3.	Sarjana Muda (D3)	-	-
4.	SLTA/SMK	3	8
5.	SLTP	-	-
	JUMLAH	14	100

Selanjutnya, dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kantor Kecamatan Bontosikuyu juga telah diberikan kewenangan untuk mengelola aset daerah sekaligus merupakan fasilitas kerja bagi aparat

LAKIP KECAMATAN BONTOSIKUYU TAHUN 2024

pemerintah di kecamatan.

Sampai dengan periode 31 Desember 2024, Barang Milik daerah yang berada dalam penguasaan dan pengelolaan Kecamatan Bontosikuyu senilai Rp.2.835.989.000,- yang terdiri dari tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, jaringan, bangunan air/irigasi dan aset tetap lainnya.

Tabel I.5. Rekapitulasi Barang Milik Daerah Kecamatan Bontosikuyu per 31 Desember 2024

NO.	KODE	NAMA BARANG	NILAI (Rp.)
1.	01	Tanah	228.600.000
2.	02	Peralatan Mesin	657.157.000
	02 08	Alat-alat Kedokteran	-
	02 09	Alat-alat Laboratorium	-
	02 10	Alat-alat Komputer	144.900.000
	02 05	Alat Pertanian	-
	02 06	Alat Kantor dan Rumah Tangga	228.075.000
	02 07	Alat Studio dan Komunikasi	27.700.000
	02 15	Alat Keselamatan kerja	-
	02 03	Alat-alat Angkutan	253.482.000
	02 04	Alat Bengkel dan Alat Ukur	3.000.000
3.	03	Gedung dan Bangunan	1.950.232.572
	03 11	Bangunan Gedung	1.931.832.872
	03 12	Monumen	18.400.000
4.	04	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-
	04 16	Jaringan	-
	04 13	Jalan dan Jembatan	-
	04 04	Bangunan air / Irigasi	-
	04 05	Instalasi	-
5.	05	Aset Tetap	1.771.247.289
	05 17	Buku dan Perpustakaan	
	05 18	Barang Bercorak Kebudayaan	
	05 19	Hewan dan Ternak serta tanaman	
6.	06	Konstruksi dalam Pengerjaan	
7.	07	Aset Tetap Lainnya	-

Sebagai perangkat daerah, Kantor Kecamatan Bontosikuyu juga mengelola keuangan daerah secara mandiri mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun dalam tahun anggaran 2024, alokasi anggaran yang diterima oleh Kantor Kecamatan Bontosikuyu sebesar Rp. 1.882.300.000,00,- (Satu Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Dua Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah).

D. ISU-ISU STRATEGIS

Isu strategis adalah suatu permasalahan yang sedang hangat dibicarakan orang yang mempunyai nilai kelayakan, strategis dan mendesak untuk dicarikan jalan keluarnya serta memerlukan analisis terhadap berbagai dimensi yang berpengaruh (dipengaruhi dan mempengaruhi) untuk itu perlu dicarikan alternatif pemecahannya.

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Bontosikuyu

Berdasarkan evaluasi kinerja pelayanan Kecamatan Bontosikuyu selama 5 (lima) tahun yang lalu, mencermati tantangan dan peluang pelayanan, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Bontosikuyu, maka beberapa permasalahan yang berkembang dan harus dihadapi dan diselesaikan Kecamatan Bontosikuyu 5 (lima) tahun ke depan antara lain:

1. Terbatasnya jumlah aparat/pegawai di Kecamatan dan Desa dibanding luas wilayah dan jumlah penduduk yang harus dilayani, yang mengakibatkan pelayanan kurang maksimal;
2. Masih terbatasnya jumlah sarana dan prasarana yang ada di Kantor Kecamatan dan Desa sehingga pelayanan terhadap masyarakat terhambat;
3. Belum optimalnya kompetensi sumber daya aparatur Kecamatan, dan Desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing;
4. Masih lemahnya pelayanan fungsi dan tugas pokok di Kecamatan, dan Desa sehingga penilaian kinerja aparatur pemerintahan kurang;
5. Lambatnya peranan fungsi kelembagaan di masyarakat akibat kurang koordinasi yang baik dengan seluruh elemen masyarakat dan pemerintah Desa dan Kecamatan;
6. Kurangnya perhatian Pemerintah Kabupaten terhadap kesejahteraan aparatur Kecamatan dan Desa;
7. Masih lemahnya pembinaan/koordinasi aparatur Desa tentang kebijakan Pemerintah Kabupaten. Sedangkan permasalahan terkait kondisi sosial masyarakat yang harus dihadapi oleh Pemerintah

LAKIP KECAMATAN BONTOSIKUYU TAHUN 2024

Kecamatan Bontosikuyu dalam tugas dan fungsi pelayanan, dapat dilihat dalam beberapa perspektif, menurut seksi di Kecamatan antara lain:

1. Seksi Tata Pemerintahan
 - a. Kurangnya Kualitas SDM Aparatur Pemerintah di Kecamatan, Desa dan Kelurahan dalam pelayanan kepada masyarakat;
 - b. Kurangnya pemberdayaan kepada RT/RW.
2. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum
 - a. Masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang hukum;
 - b. Cakupan wilayah yang sangat luas dengan topografi yang bervariasi, menghambat koordinasi dalam upaya menjaga ketenteraman dan ketertiban
3. Seksi Ekonomi dan Pembangunan
 - a. Kurangnya pemerataan pembangunan wilayah Desa/Kelurahan;
 - b. Belum optimalnya peran serta dan swadaya masyarakat dalam pemberdayaan dan pembangunan wilayah;
 - c. Tingginya kerusakan infrastruktur wilayah desa seperti jalan lingkungan, sanitasi lingkungan masih rendah dan pengelolaan persampahan yang belum optimal.
4. Seksi Kesejahteraan Sosial
 - a. Tingkat pendidikan masyarakat masih rendah;
 - b. Masih tingginya angka kemiskinan dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial;
 - c. Kurangnya pemahaman tentang kesehatan pada masyarakat Desa/Kelurahan.
5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
 - a. Kurangnya pengetahuan SDM di Desa dalam pengelolaan APBDesa;
 - b. Kurangnya tenaga ahli untuk operator keuangan di Desa;
 - c. Terbatasnya jumlah aparat/pegawai PNS guna mendukung pelaksanaan tugas pokok;
 - d. Belum adanya kendaraan operasional guna mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Pemantapan manajemen pembangunan berbasis kinerja, menjadi salah satu perhatian bagi Kecamatan Bontosikuyu. Beberapa inovasi yang sudah dikembangkan untuk peningkatan kinerja baik pada fase perencanaan maupun pengendalian pembangunan antara lain adalah :

1. SIPD Perencanaan
2. SIPD Penatausahaan
3. Pengumuman RUP pada SIRUP

Aplikasi ini membantu pengelolaan keuangan daerah dari yang dioperasikan oleh masing-masing SKPD sehingga dapat diketahui progres perencanaan dan penyerapan anggaran daerah.

Melalui aplikasi ini bentuk pengendalian terhadap pelaksanaan fisik keuangan kegiatan sesuai rencana khususnya kegiatan belanja langsung SKPD serta pengadaan barang dan jasa dapat dipantau secara *realtime* oleh SKPD.

A. Rencana Strategis

1. Visi dan Misi

Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah

Setiap Rencana Strategis (Renstra) harus berpedoman pada Visi dan Misi Kabupaten Kepulauan Selayar, agar dalam pencapaian tujuan pembangunan terdapat sinkronisasi. Dalam hal ini visi dan misi Kecamatan Bontosikuyu sesuai dengan RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar. Adapun Visi Pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026 dirumuskan sebagai berikut :

“ Kepulauan Selayar sebagai Bandar Maritim Kawasan Timur Indonesia ”.

Bandar Maritim adalah seluruh kegiatan yang berhubungan dengan kepelabuhanan yang memiliki kawasan khusus untuk melayani

penumpang dan bongkar/muat barang, serta perdagangan barang, jasa dan industri. Indikator utama yang hendak diwujudkan pada akhir periode RPJMD dengan visi Bandar Maritim ini adalah:

1. Kepulauan Selayar berperan menjadi simpul transportasi laut nasional;
2. Pengelolaan sumberdaya alam yang optimal dengan keseimbangan lingkungan hidup yang terjamin;
3. Kepulauan Selayar menjadi penyuplai kebutuhan pangan nasional dari komoditas perikanan serta menjadi penyedia komoditas ekspor perikanan dan non perikanan;
4. Peningkatan pelayanan, pemberdayaan masyarakat dan daya saing daerah.
5. Bandar maritim didukung oleh tiga pilar pembangunan yaitu:
 1. Kawasan Distribusi Logistik di Pammatata dan sekitarnya, ditopang oleh 5 (lima) sub-kawasan yakni:
Sub-kawasan utama pada Pelabuhan Benteng;
Sub-kawasan 2 (dua) pada kawasan pelabuhan Benteng-Jampea;
Sub-Kawasan 3 (tiga) pada Kawasan Pelabuhan Bonerate;
Sub-Kawasan 4 (empat) pada Kawasan Pelabuhan Kalaotoa.
 2. Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata di Pulau bahuluang, didukung oleh tujuh sub-kawasan yakni:
 - a. Sub-Kawasan 1 pada Kawasan Mappauhe;
 - b. Sub-Kawasan 2 pada Kawasan Baloiya;
 - c. Sub-Kawasan 3 pada Kawasan Pantai Pinang;
 - d. Sub-Kawasan 4 pada Kawasan Pantai Bahuluang;
 - e. Sub-Kawasan 5 pada Kawasan Pantai Polassi;
 - f. Sub-Kawasan 6 pada Kawasan Pantai Kayuadi;
 - g. Sub-Kawasan 7 pada Kawasan Pantai Pulau Panjang.
 3. Kawasan Industri Perikanan Terpadu (KIPT) di Hangkoang, yang didukung oleh 5 (lima) sub-sentra:
 - a. Sub Sentra Utama pada Kawasan TPI Bonehalang;
 - b. Sub-Sentra 1 pada Kawasan Pelabuhan Kayuadi;
 - c. Sub-Sentra 2 pada Kawasan Pelabuhan Benteng-Jampea;
 - d. Sub-Sentra 3 pada Kawasan Pelabuhan Bonerate;
 - e. Sub-Sentra 4 pada Kawasan Pelabuhan Kalaotoa.

Kawasan Timur Indonesia: berada pada kawasan timur Indonesia dengan jaringan (hub) perdagangan barang/jasa, industri, dan distribusi logistic

yang mencakup kabupaten/kota pada wilayah Teluk Bone, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah Bagian Timur, Maluku dan Maluku Utara.

Dimana dalam mencapai visi tersebut di dalam RPJMD ditetapkan misi yang berfungsi sebagai upaya untuk mewujudkan visi yang rumusannya dapat dielaborasi sebagai berikut :

Misi dalam RPJMD ini diartikan sebagai upaya umum dalam mewujudkan visi. Misi yang diajukan oleh kepala daerah terpilih adalah sebagai berikut.

1. Mengembangkan tatakelola pemerintahan yang akuntabel dan transparan
2. Meningkatkan kualitas pembangunan perdesaan
3. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat
4. Mengembangkan pengelolaan potensi kelautan
5. Meningkatkan pembinaan kehidupan sosial dan keagamaan
6. Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup

Tujuan dalam RPJMD ini diartikan sebagai kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan selama periode RPJMD. Menurut Permendagri 86/2017, rumusan tujuan pembangunan memiliki kriteria:

1. Diturunkan secara lebih operasional dari masing-masing misi pembangunan daerah dengan memperhatikan visi;
2. Untuk mewujudkan misi dapat dicapai melalui beberapa tujuan;
3. Disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah;
4. Dapat diukur dalam jangka waktu lima tahunan; dan
5. Disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami.

Perumusan visi secara garis besar dengan langkah-langkah:

1. Merumuskan rancangan pernyataan tujuan dari setiap misi dan melihat kesesuaian dengan program kepala daerah terpilih;
2. Menguji apakah rancangan pernyataan tujuan dapat memecahkan permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah;
3. Merumuskan indikator tujuan yang memenuhi kriteria SMART-C.

Sasaran dalam RPJMD ini diartikan sebagai rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program perangkat daerah. Kriteria sasaran adalah:

1. Dirumuskan untuk mencapai atau menjelaskan tujuan;
2. Satu tujuan dapat dicapai melalui beberapa sasaran;
3. Disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah; dan
4. Memenuhi kriteria SMART-C.

Sasaran dirumuskan melalui langkah-langkah:

1. Merumuskan rancangan pernyataan-pernyataan sasaran dari setiap tujuan;
2. Merumuskan indikator sasaran yang terukur, sekurang-kurangnya memenuhi indikator sasaran pokok RPJPD yang relevan; dan
3. Menyelaraskan rancangan pernyataan-pernyataan sasaran dan capaian indikator yang terukur terhadap pernyataan arah kebijakan dan sasaran RPJMN untuk penyusunan rancangan awal RPJMD.

2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1-5 tahun mengacu visi dan misi serta didasarkan isu dan analisis strategis. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi. Sasaran merupakan hasil yang ingin dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran.

Berdasarkan tujuan yang ditetapkan, Kecamatan Bontosikuyu akan mengetahui hal-hal yang harus dicapai dalam kurun waktu 1 sampai 5 tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki serta faktor lingkungan yang mempengaruhinya.

Perumusan tujuan dan sasaran Kecamatan Bontosikuyu tahun 2021
– 2026 sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan adalah
sebagai berikut :

Tabel. II.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Bontosikuyu

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun					
				2021	2023	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah (M-1)	Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada masyarakat	Indeks Kepuasan masyarakat	70 %	70,5 %	72,7 %	75,2 %	80,2 %	85,2
		Meningkatnya nilai SAKIP	Nilai SAKIP Kecamatan	60 %	60,2	65,2	70,2	75,2	80
		Meningkatnya tertib administrasi pengelolaan keuangan dan aset daerah	Laporan Keuangan Kecamatan Bontosikuyu sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai
2	Meningkatnya keberdayaan masyarakat perdesaan (M-2)	Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat desa	% Meningkatnya fungsi lembaga desa yang dikoordinasikan	100	100	100	100	100	100
		Meningkatnya kualitas Pemerintahan Desa	% Urusan Pemerintahan Desa yang difasilitasi	100	100	100	100	100	100
3	Meningkatnya pembinaan kehidupan sosial dan keagamaan (M5)	Meningkatnya upaya pelestarian kearifan lokal dengan mengaktualisasika pada kehidupan sosial	Indeks ketahanan sosial	0,6900	0,6950	0,7050	0,7150	0,7200	0,7200
		Meningkatnya fasilitasi pelayanan keagamaan	Angka kriminalitas	9,60	9,50	8,50	8,00	7,20	6,25

LAKIP KECAMATAN BONTOSIKUYU TAHUN 2024

3. Strategi dan Arah Kebijakan dalam Renstra Kecamatan Bontosikuyu

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Pemerintah Kecamatan Bontosikuyu mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi.

Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi harus dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (*strategy focussed-management*). Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan.

Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.

Strategi dan arah kebijakan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Bontosikuyu dalam kurun waktu 5 tahun (Tahun 2020 – 2024) disajikan pada tabel berikut :

Tabel. II.2. Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Bontosikuyu
VISI : Kepulauan Selayar Sebagai Bandar Maritim Kawasan Timur Indonesia

MISI I : Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Transparan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mewujudkan reformasi birokrasi daerah	Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan	Meningkatkan pelayanan yang responsive disertai pendekatan inovasi dan pemanfaatan teknologi informasi	Penerapan mekanisme kerja yang berorientasi pada pengembangan profesionalisme, pengembangan standar kompetensi aparatur.
		Meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah seiring dengan meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran	Penerapan mekanisme kerja yang berorientasi pada transparansi yang dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka dan aktual.
		Meningkatnya prosedur pelaporan system keuangan yang berbasis aktual melalui pendampingan dan meningkatkan pengawasan internal	Peningkatan SDM pegawai untuk lebih beradaptasi pada system keuangan yang diaplikasikan.

MISI II : Meningkatkan Kualitas Pembangunan Pedesaan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan kapasitas dan fasilitas pedesaan	Meningkatnya keberdayaan masyarakat pedesaan	Mengoptimalkan produktifitas dan keberdayaan masyarakat desa seiring dengan meningkatkan koordinasi	Pengoptimalan koordinasi dengan intransi terkait dan peningkatan partisipasi masyarakat yang dikoordinasikan dengan pemerintah desa
	Meningkatnya pengelolaan sumber daya lokal	Mengoptimalkan pengelolaan sumber daya lokal seiring dengan perluasan lapangan pekerjaan disertai dengan peningkatan pendapatan	Mengoptimalkan koordinasi dengan pemerintah desa perihal sumber daya lokal yang berpotensi untuk dikembangkan secara berkelanjutan

MISI III : Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya fasilitas pembangunan sumber daya manusia	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat	Meningkatkan kualitas pelayanan minimal dengan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendukung secara profesional Optimalisasi peran perempuan terhadap pembangunan disertai dengan peningkatan kualitas keluarga dan pemberdayaan perempuan	Pendataan kebutuhan sarana dan prasaran serta peningkatan pembangunannya sebagai dukungan peningkatan pelayanan minimal Mengoptimalkan kegiatan perempuan yang bersifat sosial ekonomi sebagai dukungan pembangunan ekonomi keluarga

	Meningkatkan perilaku hidup sehat	Kegiatan kecamatan sehat yang lebih aktif dan nyata
Meningkatnya daya beli masyarakat	Optimalisasi sumber-sumber pendapatan masyarakat melalui pengelolaan potensi sumber daya lokal dan proyek padat karya	Mengoptimalkan pengelolaan kegiatan ekonomi yang berbasis pada kearifan lokal

Misi ke IV : Mengembangkan Pengelolaan Potensi Kemaritiman

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mengoptimalkan pemanfaatan potensi kemaritiman	Meningkatkan usaha perikanan	Memperkuat dukungan sarana dan prasarana perikanan disertai dengan penciptaan nilai tambah melalui optimalisasi pengelolaan dan pemasaran hasil perikanan	Membangun sarana dan prasana di desa melalui koordinasi dan prioritas APBDes bidang perikanan
Meningkatkan usaha pariwisata		Memperkuat dukungan sarana dan prasarana kepariwisataan disertai dengan meningkatkan daya tarik destinasi, ekonomi kreatif, promosi dan sumber daya manusia pariwisata	Meningkatkan usaha ekonomi kreatif berbasis kearifan lokal melalui program ekonomi kerakyatan dan memfasilitasi pembangunan kepariwisataan berbasis kearifan lokal
Meningkatkan usaha perdagangan		Meningkatkan kualitas infrastruktur dan kapasitas pelabuhan seiring meningkatkan jangkauan ketersediaan hub-hub sebagai tempat transit sambil	Memfasilitasi peningkatan pembangunan sarana dan prasarana transportasi

meningkatkan kerja sama antara daerah

Misi ke V : Meningkatkan Pembinaan Kehidupan Sosial dan Keagamaan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Memantapkan jati diri keselayaran (T-17)	Meningkatnya kecintaan dan kebanggaan sebagai orang selayar (S-27)	Meningkatkan kualitas pemahaman dan pengalaman tradisi dan nilai-nilai kearifan lokal dalam segala aktivitas masyarakat	Pengintegrasian tradisi dan nilai-nilai kearifan lokal kedalam setiap aktivitas masyarakat dan kegiatan kesiswaan

Misi ke V : Meningkatkan Pembinaan Kehidupan Sosial dan Keagamaan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Kualitas kehidupan sosial	Meningkatnya nilai aktualisasi nilai budaya dan keagamaan	Meningkatkan upaya pelestarian nilai-nilai budaya dan kearifan lokal dengan mengaktualisasikan pada kehidupan social	Mendorong aktifitas adat dan budaya yang tetap berpegang pada nilai-nilai keagamaan

Misi ke V : Meningkatkan Pembinaan Kehidupan Sosial dan Keagamaan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Peningkatan kualitas lingkungan hidup	Meningkatnya pelestarian lingkungan hidup	Menurunkan tingkat perusakan lingkungan hidup dan penemaran serta menigitasi lingkungan sejalan denga penguatan koordinasi lintas sector	Memfasilitasi kegiatan pengawasan lingkungan berbasis kearifan lokal

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator kinerja utama atau IKU adalah ukuran atau indikator kinerja suatu instansi, utamanya dalam mencapai tujuan dan sasaran tertentu. Setiap lembaga atau instansi Pemerintah Wajib merumuskan indikator kinerja sebagai berikut :

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya kualitas pemerintahan Daerah yang bersih dan akuntabel	Persentase jumlah dokumen perencanaan, laporan keuangan dan kinerja Kecamatan yang benar dan tepat waktu	Jumlah dokumen perencanaan, laporan keuangan dan Kinerja Kecamatan yang disusun secara benar dan tepat waktu -----x100% Jumlah dokumen perencanaan yang harus dilaporkan	Dokumen RPJMD
2.	Meningkatnya kualitas pemerintahan Daerah yang efektif dan efisien	Persentase cakupan layanan administrasi perkantoran Persentase pemenuhan sarana prasarana dan fasilitas kerja aparatur yang mendukung kinerja Persentase aparatur yang telah mengikuti diklat teknis/fungsional Persentase aparatur yang telah mengikuti diklat teknis/fungsional	Jumlah jenis kebutuhan layanan administrasi perkantoran yang terpenuhi dalam setahun Jumlah sarana dan prasarana yang layak fungsi -----x100% Jumlah keseluruhan sarana dan prasarana Jumlah aparatur kecamatan yang disiplin -----x100% Jumlah seluruh aparatur kecamatan Jumlah aparatur kecamatan yang telah mengikuti diklat -----x100% Jumlah aparatur kecamatan yang bersyarat mengikuti diklat	Dokumen RPJMD

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
3.	Terpeliharanya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	Persentase koordinasi, dan fasilitasi penyelenggaraan layanan bidang ketentraman dan ketertiban umum yang ditingkatkan	Jumlah koordinasi, fasilitasi bidang trantib yang dilaksanakan -----x100% Jumlah koordinasi, fasilitasi bidang trantib yang seharusnya dilaksanakan	Dokumen RPJMD
4.	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa	Persentase koordinasi, dan fasilitasi penyelenggaraan layanan bidang pemerintahan yang ditingkatkan Persentase pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan yang ditingkatkan	Jumlah koordinasi, fasilitasi bidang pemerintahan yang dilaksanakan -----x100% Jumlah koordinasi, fasilitasi bidang pemerintahan yang seharusnya dilaksanakan Jumlah koordinasi, fasilitasi bidang pemberdayaan masy desa/kel. yang dilaksanakan -----x100% Jumlah koordinasi, fasilitasi bidang pemberdayaan masy desa/kel. yang seharusnya dilaksanakan	Dokumen RPJMD

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
5.	Berkurangnya penduduk miskin	Persentase koordinasi, dan layanan penyelenggaraan bidang kesejahteraan sosial yang ditingkatkan	Jumlah koordinasi, fasilitasi bidang kesejahteraan sosial yang dilaksanakan -----x100% Jumlah koordinasi, fasilitasi bidang kesejahteraan sosial yang seharusnya dilaksanakan	Dokumen RPJMD
6.	Meningkatnya daya saing dan produktivitas tenaga kerja	Persentase koordinasi, dan layanan penyelenggaraan bidang ekonomi dan pembangunan yang ditingkatkan	Jumlah koordinasi, fasilitasi bidang ekonomi dan pembangunan yang dilaksanakan -----x100% Jumlah koordinasi, fasilitasi bidang ekonomi dan pembangunan yang seharusnya dilaksanakan	Dokumen RPJMD

C. RENCANA KERJA TAHUNAN

Dalam mencapai kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan dan misi serta visi telah dilaksanakan dengan baik, meskipun masih ditemukan adanya beberapa kendala dan permasalahan yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan di tahun 2024, Kecamatan Bontosikuyu telah menyusun Rencana Kerja Tahunan telah menyusun program yang telah ditetapkan sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota
 - Perencanaan, Penganggaran&Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pem. Daerah
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
 - Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan
 - Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman&Ketertiban Umum
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

D. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Perjanjian Kinerja Kecamatan Bontosikuyu adalah dokumen yang berisikan penugasan dari Camat Bontosikuyu kepada Pejabat Eselon III dan IV yang berada dibawahnya untuk melaksanakan program/kegiatan Tahun 2024 yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Kecamatan Bontosikuyu, sebagaimana terlampir.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, di mana program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *good governance* di mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai.

A. PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja maupun Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) di Pemerintah Kecamatan Bontosikuyu dilakukan dengan rumus sebagai berikut :

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Atau

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{(2 \times \text{Rencana}) - \text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran menggunakan interpretasi penilaian dengan pengukuran dengan skala ordinal yaitu :

Tabel III.1. Pengukuran dengan Skala Ordinal

Skala Ordinal	Predikat/Kategori
>85	Sangat Berhasil
$70 < X \leq 85$	Berhasil
$55 < X \leq 70$	Cukup Berhasil
< 55	Tidak Berhasil

Untuk capaian masing-masing indikator kinerja sasaran disimpulkan berdasarkan "**Metode Rata- Rata Data Kelompok**". Penyimpulan capaian sasaran nilai **mean** setiap kategori ditetapkan sebagai berikut :

Penyimpulan pada tingkat sasaran dilakukan dengan mengalikan jumlah indikator untuk setiap kategori (sangat berhasil, berhasil, cukup berhasil dan tidak berhasil) yang ada disetiap kelompok sasaran dengan nilai mean (rata-rata) skala ordinal dari setiap kategori, dibagi dengan jumlah indikator yang ada di kelompok sasaran tersebut.

$$\text{Capaian sasaran} = \frac{\text{Jumlah indikator untuk setiap kategori} \times \text{nilai mean setiap kategori}}{\times 100\% \text{ Jumlah indikator kinerja sasaran}}$$

Nilai **mean** setiap kategori ditetapkan sebagai berikut :

Sangat Berhasil	: 92,5
Berhasil	: 77,5
Cukup Berhasil	: 62,5
Tidak Berhasil	: 27,5

Capaian Kinerja Pemerintah Kecamatan Bontosikuyu Tahun 2024

Secara umum Pemerintah Kecamatan Bontosikuyu telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Bontosikuyu Tahun 2021-2026.

Capaian Indikator Kinerja Utama Kecamatan Bontosikuyu Tahun 2024, sebagai berikut :

Tabel III.2. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2024

No	Indikator Kinerja	Capaian 2023	2024				Target Akhir RENSTRA (2024)
			Target	Realisasi	Nilai Capaian (%)	Kategori	
1.	Persentase Pelayanan administrasi kependudukan	3	3	3	100	Sangat berhasil	3
2.	Persentase pelayanan administrasi pertanahan	7	7	7	100	Sangat berhasil	7
3.	Persentase administrasi asset/kekayaan daerah	9	9	9	100	Sangat berhasil	9
4.	Jumlah Desa dengan realisasi PBB yang mencapai target	12	12	12	100	Sangat berhasil	8
5.	Persentase peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	8	8	8	100	Sangat berhasil	8
6.	Persentase pelaksanaan kebijakan KDH/Perda	5	5	5	100	Sangat berhasil	5

No	Indikator Kinerja	Capaian 2023	2024				Target Akhir RENSTRA (2024)
			Target	Realisasi	Nilai Capaian (%)	Kategori	
7	Jumlah SDLH,Illegal Logging dan Fishing Sumber daya dan lingkungan hidup yang diawasi	8	8	8	100	Sangat berhasil	8
8	Jumlah informasi potensi bencana alam yang disebar luaskan	3	3	3	100	Sangat berhasil	3
9.	Persentase Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun Desa	8	8	8	100	Sangat berhasil	8
10	Jumlah IMB yang diterbitkan						
11	Jumlah Pelaku usaha UMKM yang di beri rekomendasi						
12	Jumlah Sehat yang dibina	8	8	8	100	Sangat berhasil	8
13	Jumlah Kegiatan Keagamaan yang dilombakan	1	1	1	100	Sangat berhasil	1
14	Jumlah Budaya/ Nilai Sejarah yang di kembangkan	2	2	2	100	Sangat berhasil	2
15	Jumlah kegiatan Pemuda dan Olahraga yang dibina	1	1	1	100	Sangat berhasil	1
16	Pengawasan penyaluran BLT	8	8	8	100	Sangat berhasil	8
17	Jumlah penanganan kasus gizi buruk	0	0	0	100	Sangat berhasil	0

LAKIP KECAMATAN BONTOSIKU TAHUN 2024

No	Indikator Kinerja	Capaian 2023	2024				Target Akhir RENSTRA (2024)
			Target	Realisasi	Nilai Capaian (%)	Kategori	
18	Jumlah Desa yang dilombakan	12	12	12	100	Sangat berhasil	8
19	Jumlah Desa Siaga	12	12	12	100	Sangat berhasil	8
20	Penurunan jumlah temuan terhadap Laporan Keuangan Desa	6	6	6	100	Sangat berhasil	6
21	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Asistensi APBDes	6	6	6	100	Sangat berhasil	6

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 21 indikator kinerja utama, disimpulkan bahwa 21 (dua puluh satu) indikator sasaran dikategorikan sangat berhasil.

Dengan telah dilaksanakan pengukuran kinerja sasaran beserta simpulan rata-rata sesuai dengan "**Metode rata-rata data kelompok**", maka hasil penyimpulan sasaran untuk capaian masing-masing sasaran disajikan sebagai berikut :

Tabel III.2 Rekapitulasi Capaian Sasaran Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Capaian Kinerja	Skala Pengukuran Ordinal			
			Sangat Berhasil	Berhasil	Cukup Berhasil	Tidak Berhasil
			> 85	70 – 85	55 - 70	< 55
1.	Meningkatnya pelayanan administrasi pemerintahan	100				
2.	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	100				
3.	Meningkatnya pelayanan, pembinaan bidang ekonomi dan	100				
4.	Meningkatnya pembinaan, pengawasan, rehabilitasi dan fasilitasi layanan bidang kesejahteraan sosial	100				
5.	Meningkatnya fasilitasi, penyelenggaraan layanan dan pembinaan bidang pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan	100				
Rata-rata Capaian Sasaran		100				

B. Analisis Capaian Kinerja

1. Sasaran 1	Meningkatnya Pelayanan administrasi pemerintahan di Kecamatan Bontosikuyu
---------------------	---

Dalam mengukur capaian keberhasilan pada sasaran 1, beberapa indikator yang dijadikan sebagai variabel, sebagaimana disajikan dalam tabel berikut :

Tabel. III.3. Evaluasi Pencapaian Sasaran 1

No	Indikator Kinerja	Capaian 2023	2024				Target Akhir RENSTRA (2024)	Capaian s/d 2016 terhadap 2024 (%)
			Target	Realisasi	Nilai Capaian (%)	Kategori		
1.	Persentase Pelayanan administrasi kependudukan	3	3	3	100	Sangat berhasil	3	100
2.	Persentase pelayanan administrasi pertanahan	7	7	7	100	Sangat berhasil	7	100
3.	Persentase administrasi asset/kekayaan daerah	9	9	9	100	Sangat berhasil	9	100
4	Jumlah Desa/ Kelurahan dengan realisasi PBB yang mencapai target	8	8	8	100	Sangat berhasil	8	100

Sasaran 1 (satu) terdiri dari 4 (Empat) indikator sasaran berdasarkan hasil pengukuran kinerja dengan nilai rata-rata capaian sasaran sebesar 100% dengan kategori Sangat Berhasil. Selengkapnya nilai capaian indikator pada sasaran 1 (satu) sesuai hasil pengukuran kinerja sebagai berikut :

1. Persentase pelayanan administrasi Kependudukan

Selama tahun 2024, dari target yang ditetapkan sebanyak 3 jenis Informasi Kependudukan yang dihasilkan, dapat direalisasikan sebesar 100 % karena telah tersusun 3 jenis dokumen kependudukan yang diterbitkan oleh Pemerintah Kecamatan Bontosikuyu, masing-masing :

- Laporan Perkembangan Mutasi Penduduk;
- Dokumen Pemutakhiran Data Kependudukan (Monografi Kecamatan);
- Dokumen Profil Kecamatan

2. Persentase pelayanan administrasi pertanahan

Selama tahun 2024 Pemerintah Kecamatan Bontosikuyu sudah tidak melakukan Legalisasi maupun pelayanan administrasi pertanahan

3. Persentase administrasi asset/kekayaan daerah

Semua asset/kekayaan daerah yang dimiliki oleh Desa/Kelurahan di wilayah Kecamatan Bontosikuyu, telah diinventarisir oleh Pemerintah Kecamatan Bontosikuyu.

4. Jumlah Desa/Kelurahan dengan realisasi PBB mencapai target

Selama tahun 2024, pada dasarnya pelunasan PBB bisa terealisasi, meskipun sering terlambat karena sudah jatuh tempo.

2.	Sasaran 2	Meningkatnya Ketentraman dan ketertiban Umum
-----------	------------------	--

Tabel III.4. Evaluasi Pencapaian Sasaran 2

No.	Indikator Kinerja	Capaian 2023	2024				Target Akhir RENSTRA (2024)	Capaian s/d 2023 terhadap 2024 (%)
			Target	Realisasi	Nilai Capaian (%)	Kategori		
1.	Persentase peningkatan ketentraman dan ketertiban masyarakat	8	8	8	100	Sangat berhasil	8	100
2	Persentase pelaksanaan kebijakan KDH/Perda	3	3	3	100	Sangat berhasil	3	100
3	Jumlah Ilegal Logging dan Fishing Sumber daya dan lingkungan hidup yang diawasi	8	8	8	100	Sangat berhasil	8	100
4	Jumlah informasi potensi bencana alam yang disebarluaskan	3	3	3	100	Sangat berhasil	3	100

Sasaran 2 (dua) terdiri dari 4 (Empat) indikator sasaran, dengan nilai capaian rata-rata sasaran sebesar 100 dengan kategori sangat berhasil.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari berbagai program yang dilakukan terkait dengan Meningkatnya ketentraman dan ketertiban Umum, antara lain :

1. Peningkatan ketentraman dan ketertiban masyarakat

Selama tahun 2024, Pemerintah Kecamatan Bontosikuyu telah melaksanakan koordinasi dan fasilitasi terhadap kasus keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Kecamatan Bontosikuyu, antara lain : kasus perjudian, kenakalan remaja, pencurian, sengketa lahan, perkelahian, ternak dan ilegal logging.

2. Pelaksanaan kebijakan KDH/Perda meliputi :

Selama tahun 2024, Pemerintah Kecamatan Bontosikuyu telah melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penerapan berbagai peraturan perundang-undangan. Dari 5 (lima) kegiatan yang ditargetkan, terealisasi sebanyak 5 (lima) kegiatan koordinasi dan atau fasilitasi terkait penerapan peraturan perundang-undangan. Adapun kelima kegiatan dimaksud, yaitu :

- a. Sosialisasi Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar tentang Larangan Merokok di Lingkungan Kantor /Instansi Pemerintah dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar.
- b. Koordinasi, Fasilitasi dan Sosialisasi Penertiban ternak
- c. Fasilitasi pertemuan dengan para Aparat Sipil Negara yang wilayah tugasnya di Kecamatan Bontosikuyu. Kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan memberi arahan dan penegasan kepada masing-masing ASN yang hadir agar dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara disiplin.

3. Jumlah Illegal Logging dan Fishing, Sumber Daya dan lingkungan hidup yang diawasi.

Selama tahun 2024, Pemerintah Kecamatan Bontosikuyu telah melaksanakan koordinasi dan fasilitasi Illegal Logging dan Fishing, SDLH pada 12 Desa di wilayah Kecamatan Bontosikuyu.

4. Jumlah Informasi Potensi bencana alam yang disebarluaskan meliputi:
- Air pasang pinggir pantai
 - Longsor untuk wilayah pinggir laut
 - Angin kencang

3. Sasaran 3	Meningkatnya Pelayanan, Pembinaan Ekonomi dan Pembangunan
---------------------	---

Tabel III.5. Evaluasi Pencapaian Sasaran 3

No.	Indikator Kinerja	Capaian 2023	2024				Target Akhir RENST RA (2024)	Capaian s/d 2026 terhadap 2024 (%)
			Target	Realisasi	Nilai Capaian (%)	Kategori		
1.	Persentase Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun Desa	8	8	8	100	Sangat berhasil	8	100
2	Jumlah IMB yang diterbitkan	5				Sangat berhasil		100
3	Jumlah Pelaku usaha UMKM yang di beri rekomendasi	100	300			Sangat berhasil	100	100

Sasaran Meningkatkan Pelayanan Pembinaan Bidang Ekonomi dan Pembangunan pencapaiannya diukur melalui 3 (tiga) indikator kinerja, dengan capaian rata-rata sebesar 83 %. Adapun indikator kinerja yang diukur, adalah :

1. Persentase Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam membangun Desa

Sebagai wakil pemerintah kabupaten di wilayah kecamatan, Camat memegang peran penting dan strategis terutama dalam menjembatani hubungan fungsional baik antara pemerintah desa dengan pemerintah kabupaten maupun antara masyarakat dengan

LAKIP KECAMATAN BONTOSIKUYU TAHUN 2024

4. Sasaran 4	Meningkatnya Pembinaan, pengawasan, Rehabilitasi dan fasilitasi Layanan bidang Kesejahteraan Sosial
---------------------	---

Tabel III.6. Evaluasi Pencapaian Sasaran 4

No.	Indikator Kinerja	Capaian 2024	2024				Target Akhir RENSTRA (2024)	Capaian s/d 2023 terhadap 2024 (%)
			Target	Realisasi	Nilai Capaian (%)	Kategori		
1.	Jumlah Desa Sehat yang dibina	12	12	12	100	Sangat berhasil	8	100
2.	Jumlah Kegiatan Keagamaan yang dilombakan	1	2	2	100	Sangat berhasil	2	100
3.	Jumlah Budaya/ Nilai Sejarah yang di kembangkan	2	2	2	100	Sangat berhasil	2	100
4.	Jumlah kegiatan Pemuda dan Olahraga yang dibina	1	1	1	100	Sangat berhasil	1	100
5.	Persentase pengawasan Penyaluran BLT	12	12	12	100	Sangat berhasil	8	100

Sasaran 4 (empat) terdiri dari 4 (Empat) indikator sasaran dengan nilai rata-rata capaian sasaran sebesar 100 persen dengan kategori Berhasil. Selengkapnya nilai capaian indikator sasaran pada sasaran 5 (Lima) sesuai hasil pengukuran kinerja sebagai berikut :

1. Jumlah Desa/Kelurahan Sehat yang dibina

Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan Kabupaten Sehat perlu diadakan Pembinaan lanjutan kecamatan sehat yang dimulai dari bawah (Desa/Kelurahan) sehat, dengan pembinaan yang berkelanjutan diharapkan mampu menerapkan Pola Hidup Bersih dan Sehat dalam kehidupan sehari-hari.

2. Jumlah Kegiatan Keagamaan yang dilombakan

Pada tahun 2024 ada 1 jenis kegiatan keagamaan yang dilombakan, meliputi :

- Lomba MTQ

- Lomba Festival anak saleh tidak di lombakan mengingat kekurangan anggaran/dana

3. Jumlah Budaya/ Nilai Sejarah yang di kembangkan

Indikator ini bertujuan untuk meningkatkan pengembangan nilai-nilai budaya lokal, sejarah lokal, lembaga adat yang difasilitasi dengan jenis kegiatan :

- Pelaksanaan kegiatan hari-hari besar (HUT Proklamasi)
- Peringatan Hari Jadi Selayar

4. Jumlah kegiatan Pemuda dan Olahraga yang dibina

Selama Tahun 2024 kegiatan Pemuda dan olahraga yang dibina adalah Sepak Bola Pesantren Babussalam, dimana Tim keseblasan yang dibina secara kontinyu mampu mengikuti even-even lomba sepak bola tingkat Kabupaten.

5. Persentase pengawasan penyaluran BLT

Penyaluran BLT untuk semua Desa dalam wilayah Kecamatan Bontosikuyu dilakukan pengawasan secara berkesinambungan untuk menghindari pemberian bantuan BLT yang tidak tepat sasaran.

5. Sasaran 5	Meningkatnya Fasilitas, Penyelenggaraan Layanan dan Pembinaan di Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan
---------------------	---

Tabel III.7. Evaluasi Pencapaian Sasaran 5

No.	Indikator Kinerja	Capaian 2023	2024				Target Akhir RENSTRA (2024)	Capaian s/d 2023 terhadap 2024 (%)
			Target	Realisasi	Nilai Capaian (%)	Kategori		
1.	Persentase Penurunan kasus gizi buruk	12	12	12	100	Sangat berhasil	8	100
2.	Jumlah Desa/ Kelurahan yang dilombakan	12	12	12	100	Sangat berhasil	8	100
3.	Jumlah Desa/ Kelurahan Siaga	12	12	12	100	Sangat berhasil	8	100
4.	Persentase Penurunan jumlah temuan terhadap Laporan Keuangan Desa	6	6	6	100	Sangat berhasil	6	100

LAKIP KECAMATAN BONTOSIKUYU TAHUN 2024

5.	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Asistensi APBDes	6	6	6	100	Sangat berhasil	6	100
----	--	---	---	---	-----	-----------------	---	-----

Sasaran 5 (Lima) terdiri dari 5 (lima) indikator sasaran dengan nilai rata-rata capaian sasaran sebesar 100 persen dengan kategori Berhasil. Selengkapnya nilai capaian indikator sasaran pada sasaran 5 (Lima) sesuai hasil pengukuran kinerja sebagai berikut :

1. Persentase penurunan kasus gizi buruk

Pada dasarnya kasus gizi buruk ataupun gizi kurang masih mampu ditangani oleh Desa/Kelurahan, salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Desa/Kelurahan adalah dengan mengalokasikan Biaya Penanganan Gizi Buruk pada DPA bagi Kelurahan ataupun APBDes bagi Desa untuk mengantisipasi adanya balita yang terkena kasus gizi buruk.

2. Jumlah Desa/Kelurahan yang dilombakan

Pada setiap tahunnya Pemerintah Kecamatan Bontosikuyu mengalokasikan pada RKA Biaya Lomba Desa/Kelurahan namun tahun ini tidak dianggarkan karena kurangnya anggaran, namun pembinaan desa / kelurahan tetap dilaksanakan.

3. Jumlah Desa/Kelurahan Siaga

Jumlah Desa/Kelurahan Siaga yang ada di Kecamatan Bontosikuyu adalah 6 Desa dan 2 Kelurahan, salah satu kegiatannya adalah koordinasi kegiatan gerakan sayang ibu untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat lewat posyandu dan GSI.

4. Persentase Penurunan jumlah temuan terhadap Laporan Keuangan Desa

Demi terwujudnya tertib administrasi laporan keuangan Desa maka pembinaan rutin yang dilakukan adalah :

- Pembinaan APBDes pada 12 Desa yang ada di Kecamatan Bontosikuyu

5. Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Asistensi APBDes

Salah satu tugas Pemerintah Kecamatan adalah membina penyelenggaraan pemerintahan desa, memberikan bimbingan dan

pembinaan dalam pelaksanaan APBDes. Bimbingan dan pembinaan yang dilakukan pada 12 Desa adalah :

- Asistensi Penyusunan APBDes
- Asistensi Perubahan APBDes

C. Realisasi Keuangan Kecamatan Bontosikuyu 2024

Realisasi Keuangan Kecamatan Bontosikuyu Tahun 2024, disajikan dalam bentuk tabel realisasi pelaksanaan program dan kegiatan sebagai berikut :

Tabel III.8. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

NO.	PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN		HASIL		KET
		TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	7
I.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.764.702.300	1.785.754.900			
I.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.500.000	4.500.000			
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.500.000	1.500.000	Rasio Dokumen Perencanaan dan Pelaporan yang Disusun (2 Dokumen ; Renja Pokok dan Renja Perubahan)	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Sesuai Juknis	
2.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.500.000	1.500.000	Rasio Dokumen Perencanaan dan Pelaporan yang Disusun (2 Dokumen ; RKA dan RKAP)	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Sesuai Juknis	
3.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen perubahan DPA-SKPD	1.500.000	1.500.000	Rasio Dokumen Perencanaan dan Pelaporan yang Disusun (2 Dokumen ; DPA dan DPPA)	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Sesuai Juknis	
4.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Rasio Dokumen Perencanaan dan Pelaporan yang Disusun (3 Dokumen ; LAKIP, LKPJ dan RPK)	Tersusunnya Dokumen Laporan Capaian Kinerja Sesuai Juknis	
II.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.466.848.200	1.472.100.000			
1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.466.848.000	1.466.848.000	Administrasi Keuangan dan Belanja Pegawai/ASN Terpenuhi	Terpenuhi Belanja Pegawai/ASN (Gaji dan lain-lain)	
2.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			Administrasi Keuangan dan Belanja Pegawai/ASN Terpenuhi	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun	
III.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	101.065.000	80.315.000			
1.	Pendaftaran dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	24.500.000	0	Layanan Administrasi Kepegawaian dan Peningkatan SDM tersedia	Tersedianya Administrasi Kepegawaian yang akurat	
IV.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	101.065.000	83.315.000			
1.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	24.500.000	-	Terpenuhi Penunjang Administrasi Umum	Terpenuhi penyediaan Barang Cetak (Spanduk)	
2.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	4.080.000	4.080.000	Terpenuhi Penunjang Administrasi Umum	Terpenuhi Kebutuhan Fasilitas Kunjungan Tamu	
3.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	72.485.000	79.235.000	Terpenuhi Penunjang Administrasi Umum	Terpenuhi kebutuhan rapat-musabakat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	
V	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	164.099.100	173.149.900			
1.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	15.150.700	15.150.700	Terpenuhi Jasa Penunjang Layanan Umum	Terpenuhi kebutuhan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	
2.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	148.948.400	157.999.200	Terpenuhi Jasa Penunjang Layanan Umum	Terpenuhi Belanja Premi Asuransi Tenaga Kerja, Terpenuhi Belanja Premi Asuransi Tenaga Kerja (BPJS) PTT, Terpenuhi kebutuhan makan minum rapat	

LAKIP KECAMATAN BONTOSIKUYU TAHUN 2024

Kecamatan Bontotilik		Kecamatan Bontotilik		Kecamatan Bontotilik		Kecamatan Bontotilik	
VII		VIII		IX		X	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Kebutuhan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur terpenuhi		Kebutuhan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur terpenuhi		Kebutuhan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur terpenuhi	
1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Kebutuhan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur terpenuhi		Kebutuhan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur terpenuhi		Kebutuhan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur terpenuhi	
2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Kebutuhan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur terpenuhi		Kebutuhan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur terpenuhi		Kebutuhan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur terpenuhi	
3. Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya		Kebutuhan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur terpenuhi		Kebutuhan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur terpenuhi		Kebutuhan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur terpenuhi	
4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Kebutuhan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur terpenuhi		Kebutuhan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur terpenuhi		Kebutuhan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur terpenuhi	
2 PROGRAM PENYELENGGARAAN		Kebutuhan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur terpenuhi		Kebutuhan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur terpenuhi		Kebutuhan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur terpenuhi	
PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Kebutuhan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur terpenuhi		Kebutuhan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur terpenuhi		Kebutuhan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur terpenuhi	
I Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan		Kebutuhan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur terpenuhi		Kebutuhan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur terpenuhi		Kebutuhan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur terpenuhi	
1. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Kebutuhan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur terpenuhi		Kebutuhan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur terpenuhi		Kebutuhan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur terpenuhi	
II Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat		Kebutuhan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur terpenuhi		Kebutuhan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur terpenuhi		Kebutuhan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur terpenuhi	
1. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan (propil)		Kebutuhan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur terpenuhi		Kebutuhan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur terpenuhi		Kebutuhan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur terpenuhi	
3 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Kebutuhan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur terpenuhi		Kebutuhan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur terpenuhi		Kebutuhan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur terpenuhi	
VIII. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		Kebutuhan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur terpenuhi		Kebutuhan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur terpenuhi		Kebutuhan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur terpenuhi	
1. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa		Kebutuhan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur terpenuhi		Kebutuhan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur terpenuhi		Kebutuhan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur terpenuhi	
2. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Kebutuhan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur terpenuhi		Kebutuhan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur terpenuhi		Kebutuhan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur terpenuhi	
IX. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		Kebutuhan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur terpenuhi		Kebutuhan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur terpenuhi		Kebutuhan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur terpenuhi	
1. Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		Kebutuhan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur terpenuhi		Kebutuhan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur terpenuhi		Kebutuhan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur terpenuhi	
4. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		Kebutuhan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur terpenuhi		Kebutuhan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur terpenuhi		Kebutuhan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur terpenuhi	
Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa		Kebutuhan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur terpenuhi		Kebutuhan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur terpenuhi		Kebutuhan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur terpenuhi	
1. Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa		Kebutuhan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur terpenuhi		Kebutuhan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur terpenuhi		Kebutuhan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur terpenuhi	
2. Fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa		Kebutuhan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur terpenuhi		Kebutuhan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur terpenuhi		Kebutuhan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur terpenuhi	
5 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Kebutuhan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur terpenuhi		Kebutuhan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur terpenuhi		Kebutuhan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur terpenuhi	
X. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		Kebutuhan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur terpenuhi		Kebutuhan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur terpenuhi		Kebutuhan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur terpenuhi	

LAKIP KECAMATAN BONTOSIKUYU TAHUN 2024

1.	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	20.000.000	20.000.000	20.000.000	Persentase Lomba yang diikuti dalam rangka HUT Kemerdekaan RI dan Hari Jadi Selayar
2.	Facilitasi, koordinasi dan pembinaan (bimtek, sosialisasi, konsultasi, dan ketahanan nasional)				Persentase Lomba yang diikuti dalam Rangka Hari - hari Besar Keagamaan
3.	Pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional				Terselenggaranya Kegiatan keagamaan MTQ
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	27.500.000	27.500.000	27.500.000	
IX.	Facilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	27.500.000	27.500.000	27.500.000	
1.	Facilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset Desa	7.500.000	7.500.000	7.500.000	Penerbitan temak lar terlaksana sesuai Perda
2.	Facilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa	20.000.000	20.000.000	20.000.000	Terdapatnya obyek dan subyek pajak yang akurat
3.	Facilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				kondusifnya keamanan dan ketertiban masyarakat lewat koordinasi dan pembinaan
4.	Facilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan				Terselenggaranya Koordinasi Layanan Kesehatan (Kecamatan Sehat
5.	Facilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif				Jumlah usulan yang terealisasi dan usulan yang berdasarkan Prioritas Usulan
6.	Facilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa				Terselenggaranya Asistensi dan Pembinaan APBDes
	JUMLAH	1.867.048.200	1.867.048.200	1.882.300.000	

BAB IV

PENUTUP

Sebagai bagian penutup dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kecamatan Bontosikuyu Tahun 2024, disimpulkan bahwa secara umum Pemerintah Kecamatan Bontosikuyu telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran strategisnya. Sebanyak 5 (Lima) sasaran sebagaimana tertuang Dokumen Penetapan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Bontosikuyu Tahun 2021 – 2026 rata-rata telah direalisasikan dengan **Sangat Berhasil**. Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada hakikatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik.

Secara umum disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap beberapa indikator yang dicantumkan dalam RENSTRA Kecamatan Bontosikuyu Tahun 2021 – 2026 khususnya untuk Tahun Anggaran 2024, dapat dipenuhi sesuai dengan harapan. Jika terdapat indikator sasaran yang belum memenuhi target yang ditetapkan, kami akui semata-mata merupakan kelemahan dan ketidaksempurnaan sebagai manusia, karena disadari kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT., namun demikian segala kekurangan dan ketidaksempurnaan tentunya harus menjadi motivasi untuk lebih baik lagi di esok hari

Dengan	Laporan	Akuntabilitas	Kinerja	Instansi
Pemerintah	(LAKIP)	Kecamatan	Bontosikuyu,	dapat
diperoleh				

gambaran tentang penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Pemerintah khususnya pada Kantor Kecamatan Bontosikuyu Kabupaten Kepulauan Selayar.

Kedepannya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Kecamatan Bontosikuyu ini bukan hanya dalam rangka memenuhi kewajiban akuntabilitas, namun dapat memenuhi fungsinya sebagai sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja Pemerintah, khususnya pada Kantor Kecamatan Bontosikuyu Kabupaten Kepulauan Selayar.

Pariangan, 31 Desember 2024

CAMAT BONTOHARU,



Drs. MUHAMMAD ARIS

Pangkat : Pembina Tk.I

NIP. 19671029 199512 1 002